

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu industri utama yang mendorong perekonomian negara ini adalah perbankan. Perbankan merupakan salah satu industri kunci yang mendorong perekonomian negara. Dalam kerangka ekonomi negara, bank adalah sebuah perusahaan yang berfungsi sebagai tempat transaksi keuangan (Sobarna, 2021). Sebagian besar perusahaan saat ini telah menjalankan program dana pensiun bagi karyawannya, baik yang dikelola secara internal maupun melalui lembaga lain, seiring dengan diberlakukannya UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Program ini dapat dikelola sendiri oleh perusahaan atau melalui pihak ketiga. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menetapkan hak-hak peserta, menetapkan standar regulasi yang menjamin penerimaan manfaat pensiun tepat waktu, memastikan bahwa manfaat pensiun menjadi sumber pendapatan yang stabil, memberikan pengaturan yang sesuai untuk dana pensiun, mendorong pengumpulan tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, serta memastikan bahwa pemberi kerja tidak menyalahgunakan dana untuk investasi yang berisiko (Sanyoto et al., 2024).

Seiring dengan perkembangan, institusi bank kini juga dapat mengelolanya sendiri yang disebut sebagai Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Saat ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menawarkan produk pengelolaan dana pensiun yang disebut SIMPONI (DPLK BNI). Salah satu penawaran utama Bank BNI untuk menghasilkan pendapatan berbasis biaya dan investasi jangka panjang adalah simponi.

Simponi menawarkan alternatif pendapatan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masa pensiun. Sebelumnya, dana pensiun umumnya hanya dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu, bank BNI

memperkenalkan solusi dengan meluncurkan program dana pensiun yang dikenal sebagai DPLK BNI Simponi. Pilihan DPLK semakin populer di kalangan karyawan yang ingin mempersiapkan masa pensiun dengan lebih nyaman. DPLK BNI menawarkan dua jenis program pensiun, yaitu Simponi Individu dan Simponi Kolektif. Pada intinya, dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) memberikan rasa tenang kepada karyawan mengenai masa depan mereka, karena kesejahteraan mereka di hari tua dapat lebih terjamin. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan dan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih produktif.

Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan DPLK adalah manajemen risiko operasional, yang mengacu pada risiko kerugian finansial yang dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan proses internal, kesalahan manusia, atau kerusakan sistem, maupun akibat peristiwa eksternal. Seperti kesalahan dalam pengolahan data, kegagalan sistem informasi, atau bahkan penipuan. Risiko operasional dalam proses pencairan dana pensiun dapat membawa dampak negatif bagi berbagai pihak, Peserta DPLK dapat mengalami kerugian finansial jika dana pensiun mereka tidak dicairkan dengan tepat waktu atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DPLK dapat mengalami reputasi yang buruk dan kehilangan kepercayaan dari para pesertanya jika terjadi kegagalan dalam proses pencairan dana pensiun. Penyelenggara DPLK dapat mengalami kerugian finansial jika mereka harus menanggung biaya akibat Risiko operasional (Grace & Adiasih, 2022).

Sementara menurut Diaz, (2023) untuk mendorong lembaga dalam mengelola sumber daya dan risiko secara efisien, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun (UUP2SK) pada tahun 2016. UUP2SK ini mengatur pelaksanaan program pensiun di Indonesia. Penerapan UUP2SK telah mempengaruhi cara DPLK BNI dalam mengelola risiko operasionalnya. Salah satu ketentuan penting dalam UUP2SK adalah kewajiban bagi penyelenggara DPLK untuk menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif, yang harus mencakup tahapan identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan, dan

pengendalian risiko operasional. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurul Hidayati et al. (2020) menemukan bahwa penerapan Undang-Undang Pengelolaan Pensiun dan Sistem Keuangan (UU P2SK) di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan manajemen risiko operasional dalam pembayaran dana pensiun. Dengan adanya UU P2SK, pengelolaan risiko operasional, yang mencakup risiko yang timbul dari kegiatan operasional dana pensiun serta risiko inheren yang melekat pada sistem tersebut, kini telah diatur secara lebih komprehensif dan terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang lebih jelas, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terkendali bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan UU P2SK telah berhasil meningkatkan efektivitas manajemen risiko operasional melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan menyeluruh. Integrasi yang lebih baik antara berbagai aspek pengelolaan risiko telah mekan identifikasi dan mitigasi risiko secara lebih dini dan akurat. Selain itu, UU P2SK juga mendorong penerapan praktik terbaik dalam manajemen risiko yang sesuai dengan standar internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap sistem pembayaran dana pensiun di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana UU P2SK telah berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan integrasi manajemen risiko operasional pada proses pencairan dana pensiun, dengan fokus pada kasus PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Analisis ini akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dampak regulasi baru terhadap operasional dan manajemen risiko, serta implikasinya bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan dana pensiun di masa mendatang. Peneliti selama masa magang mengamati bahwa terdapat keterkaitan yang signifikan antara pengelolaan risiko operasional dengan proses pencairan dana pensiun.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan, termasuk keterbatasan waktu dan sumber daya. Penelitian ini hanya dilakukan di Grha BNI Lantai 24 dan

tidak mencakup semua kantor cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Batasan lainnya adalah bahwa penelitian ini hanya fokus pada pengelolaan risiko operasional dari proses pencairan dana pensiun BNI Simponi Lembaga Keuangan (DPLK).

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Risiko Operasional Pada Proses Pencairan BNI Simponi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Sebelum Dan Sesudah Penerapan UU P2SK Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah peneliti memperhatikan fokus penelitian tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah peneliti adalah

1. Bagaimana pengelolaan Risiko operasional pada proses pencairan BNI Simponi DPLK sebelum penerapan UU P2SK?
2. Bagaimana pengelolaan Risiko operasional pada proses pencairan BNI Simponi DPLK setelah penerapan UU P2SK?
3. Apa saja perbedaan dalam pengelolaan Risiko operasional pada proses pencairan BNI Simponi DPLK sebelum dan sesudah penerapan UU P2SK?

C. Tujuan Penelitian

a. Secara Umum

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan UUP2SK dapat mempengaruhi waktu pembayaran dana pensiun DPLK BNI Simponi, Mengajukan saran berdasarkan hasil penelitian untuk menyempurnakan prosedur pembayaran dana pensiun di DPLK BNI Simponi, mengkaji pengelolaan Risiko operasional pada proses pencairan BNI Simponi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Penyelenggaraan Program Pensiun (UUP2SK).

D. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana manajemen risiko operasional berfungsi dalam konteks lembaga keuangan, terutama dalam proses pencairan dana pensiun. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak perubahan hukum, seperti penerapan UU P2SK, terhadap manajemen risiko operasional.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan atau saran bagi DPLK BNI sebagai masukan untuk meningkatkan praktek manajemen Risiko mereka, khususnya dalam konteks pencairan dana pensiun serta memberikan edukasi kepada peserta dana pensiun tentang bagaimana dana pensiun mereka dikelola, termasuk Risiko yang mereka hadapi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan kerangka teoritis penulis, yang ia gunakan untuk menjelaskan bagaimana risiko operasional pada DPLK BNI SIMPONI.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan dibahas dalam bab ini, yang juga memberikan gambaran luas tentang pengelolaan risiko operasional DPLK BNI pada PT. Bank Negara Indonesia, struktur, visi dan tujuannya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini pembahasan dan analisis data merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan judul Analisis Pengelolaan Risiko Operasional Pada Proses Pencairan BNI SIMPONI Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Sebelum Sesudah Penerapan UU P2SK pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.

BAB V PENUTUP

Pada penelitian ini membahas tentang Kesimpulan dan Saran

